

**ANALISIS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN KAMPAR**

Widya Dwi Pertiwi Pelawi^{*}, Rosnita^{} dan Roza Yulida^{**}**

ABSTRACT

Institutional extension is a government agency which has the task and function of organizing counseling. The enactment of the Constitution No. 32 of 2004 explained that the extension activities carried out in their respective offices and constitution No 16 of 2006 explaining there are special institutions cause a wide range of extension activities in each area. The objectives of this research were reviewing the vision and mission of extension agents, analyzing the role and function of the structure based on each institution, reviewing the policy rule extension, and reviewing each program of extension agency. The research was conducted at BPPKP in Kampar District. The number of respondents were 23 people. They are heads of the field extension and head of the hall extension. The data used were primary and secondary data. Primary data was collected through interview method. Data analysis applied descriptive method. The results showed that mission and vision led to the development of natural resources and human resources, the role functions and duties of each structure has not been fully implemented in accordance with policy rules and extension activities have not been operating effectively and efficiently, rules defined policy has not done well in which BPPKP has not fully guided by the Constitution No. 16 of 2006 and extension activities are not polyvalent, programs were prepared based on the needs of farmers.

Keyword : *Institutional extension, Constitution No. 16 of 2006, polyvalen*

** Widya Dwi Pertiwi Pelawi adalah mahasiswa S1 Agribisnis, UR, Pekanbaru*

*** Rosnita dan Roza Yulida adalah Staf Pengajar Pada Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Riau, Pekanbaru*

I. PENDAHULUAN

Lembaga penyuluhan pertanian mempunyai peran strategis untuk pembangunan pertanian di Indonesia karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal bagi petani/nelayan serta mendampingi petani, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tentang usahatani, mendidik petani agar mampu memberdayakan semua potensinya, menyebarkan inovasi-inovasi baru kepada petani tentang bagaimana berusaha tani dengan baik. Upaya ini sudah mulai dirintis dari tahun 1962 melalui program bimbingan massal (bimas). Penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan sentralistik dan koordinasi yang ketat antar instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya otonomi daerah, maka pada zaman ini paradigma pembangunan pertanian telah bergeser dari pendekatan sentralistik menjadi desentralistik. Fungsi penyuluhan pertanian di beberapa provinsi dilaksanakan oleh dinas atau badan lingkup pertanian.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Undang Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2006 yang dimana menjelaskan bahwa sistem penyuluhan sudah memiliki masing-masing lembaga khusus yang menangani penyuluhan. Kelembagaan penyuluh pemerintah di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah mewarnai penyelenggaraan penyuluhan. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik tersebut, telah merubah pranata dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian serta operasionalisasinya di daerah khususnya di Provinsi Riau (Sabrina, 2009). Kabupaten Kampar salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki lembaga khusus yang menangani penyuluhan. Adanya perubahan pranata sosial kelembagaan ditingkat kabupaten/kota ini mendorong perlu dilakukan penelitian yang menganalisis penyuluhan pertanian yang berada pada lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan mengkaji visi dan misi lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar, menganalisis peran dan fungsi berdasarkan stuktur yang ada pada masing-masing lembaga penyuluhan, mengkaji aturan kebijakan yang terkait dengan penyuluhan, mengkaji program masing-masing lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar karena Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki lembaga yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian

berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2006. Lembaga itu dinamakan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP). Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni sampai Maret 2016.

2.2 Pengambilan Sampel Dan Data

Populasi penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Kampar. Metode pengambilan sampel menggunakan Metode Purposive sampling dengan kriteria yang dipakai adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyuluhan di Kabupaten Kampar. Berdasarkan kriteria tersebut yang dipilih menjadi sampel sebanyak 23 orang yaitu kepala bidang penyelenggara dan kepala bidang tata penyuluhan serta 21 kepala BPP setiap kecamatan di Kabupaten Kampar. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terstruktur berdasarkan paduan wawancara yang telah ditelaah. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan telahan dokumen dari laporan instansi terkait meliputi aspek kelembagaan (visi, misi, rencana strategis, tugas pokok dan fungsi), aspek ketenagaan (data jumlah penyuluh, status penyuluh), aspek penyelenggaraan (program, kegiatan), aspek pendanaan (alokasi anggaran, dana operasional penyuluh) serta data potensi daerah. Adapun paduan wawancara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Paduan Wawancara

Tujuan	Key Person	Paduan Wawancara
1. Mengkaji visi dan misi	Bagian Umum dan Kepegawaian	Visi dan misi
2. Menganalisis peran dan fungsi berdasarkan struktur yang ada dilembaga masing masing	Bagian kepegawaian	Struktur lembaga Fungsi dan peran Jumlah BPP Jumlah Kelompok Tani Jumlah Penyuluh
3. Mengkaji aturan kebijakan yang ada terkait dengan penyuluhan	Kepala Bidang penyuluhan Kepala BPP	Kebijakan yang ada dalam penyuluhan
4. Mengkaji prograama penyuluhan	Kepala BPP setiap kecamatan	Programa Unsur unsur Penyuluhan

2.3 Analisis Data

Analisis data digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendalam satu atau beberapa fenomena. Pada jenis penelitian ini dapat mengembangkan konsep , menghimpun data tetapi tidak menguji hipotesa. Penelitian deskriptif

bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi (Rakhmad, 2005).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar (BPPKP)

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan memiliki peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pemantapan ketahanan pangan serta mendukung dan mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian yang ada serta memiliki peran yang penting dalam mendukung strategi dari kementerian pertanian dalam mensukseskan pembangunan pertanian. Adapun visi BPPKP Kabupaten Kampar tahun 2012-2016 yang ingin diwujudkan adalah “Menjadikan Institusi yang handal, inovatif dan aspiratif dalam penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan. Makna yang ingin diwujudkan dari visi BPPKP Kabupaten Kampar adalah lembaga yang dapat mengerjakan semua pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta mampu menerima saran dan kritik dari masyarakat dan mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru terkait dengan kegiatan penyuluhan disektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.

Misi yang ingin diwujudkan oleh BPPKP Kampar dalam mendukung visi BPPKP Kabupaten Kampar terdiri dari 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, 2) mengembangkan sistem penyuluhan yang komprehensif dan terpadu, 3) meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian dan pelaku utama untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi, 4) mengembangkan dan memantapkan kelembagaan pelaku utama yang mandiri, 5) memantapkan ketersediaan pangan dan meningkatkan aksesibilitas pangan setiap rumah tangga setiap saat secara berkelanjutan, 6) mempercepat upaya penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal menuju konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi dan seimbang, 7) pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat, 8) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan. Visi dan misi tersebut dilaksanakan dengan berbagai strategi yang tepat.

Strategi yang sudah dilakukan dalam pencapaian visi dan misi BPPKP Kabupaten Kampar tahun 2016 diantaranya BPPKP Kabupaten Kampar sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar, BPPKP juga berupaya memfasilitasi semua kebutuhan kantor baik berupa jasa penyediaan air, listrik, penyediaan alat kantor, serta perawatan gedung maupun kendaraan dinas guna mendukung pelaksanaan tugas pokok walaupun dalam kenyataan masih banyak kekurangan seperti kurangnya kendaraan dinas untuk penyuluh sehingga penyuluh sulit untuk melaksanakan tugas pokok serta BPPKP belum memiliki gedung

rapat tersendiri sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi. Selain itu BPPKP melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui bimbingan teknis serta pelatihan kepada penyuluh yang dilakukan secara rutin di setiap kecamatan serta menyusun program setiap tahun dengan materi terbaru sesuai dengan kebutuhan petani dan BPPKP berupaya menambah wawasan petani dan mengikuti perkembangan teknologi dengan menyelenggarakan kegiatan berupa percontohan, pengkajian dan melaksanakan kegiatan mimbar serasehan kepada petani. BPPKP membuat suatu pelatihan dan kegiatan kunjungan kepada petani walaupun pelaksanaan tidak sesuai dengan target disebabkan karena jadwal pertemuan yang terbatas. BPPKP Kampar tidak hanya fokus kepada kegiatan penyuluhan tetapi BPPKP juga fokus kepada pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan visi yang ingin dicapai dengan melaksanakan kegiatan berupa analisa data tentang pangan dan melakukan kegiatan perlombaan cipta menu.

BPPKP Kampar memiliki kendala dalam pencapaian visi dan misi yang dimana BPPKP seharusnya melaksanakan penyuluhan yang bersifat polivalen (pertanian, perikanan dan kehutanan) tetapi dalam kenyataannya hanya dapat melakukan kegiatan penyuluhan dibidang pertanian disebabkan karena bidang perikanan dan kehutanan memiliki penyuluh tersendiri serta penyuluh pada BPPKP belum mampu menguasai semua bidang. Tetapi walaupun demikian BPPKP memiliki koordinasi yang baik dilapangan untuk membantu petani dalam menyelesaikan semua permasalahan.

Visi dan Misi BPPKP diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Kampar tahun 2016 dan visi dan Misi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau. Visi dan Misi BPPKP Kabupaten Kampar sama dengan BPP setiap kecamatan disebabkan karena BPP setiap kecamatan merupakan bagian dari BPPKP Kabupaten Kampar.

3.2 Peran dan Fungsi berdasarkan Struktur Organisasi

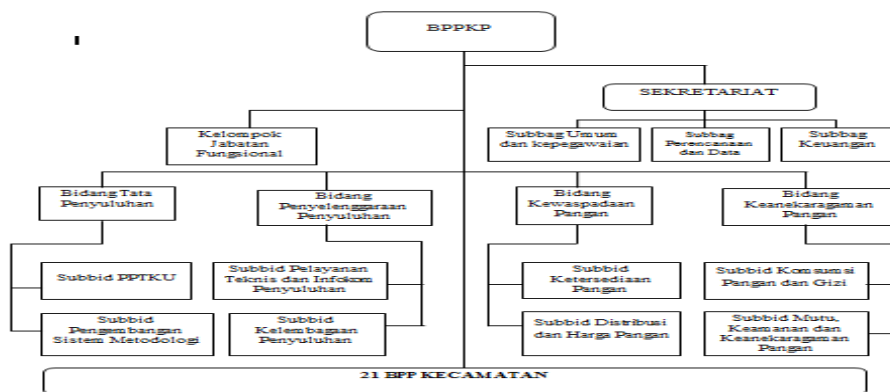
1. Kelembagaan ditingkat Provinsi

Menurut UUD No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengemukakan bahwa kelembagaan ditingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Provinsi Riau memiliki lembaga khusus yang menangani sistem penyuluhan yang bernama Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Riau. Adapun struktur organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan provinsi Riau terdiri dari sekretaris, kepala bagian tata usaha yang dibantu oleh 3 sub bagian, 3 orang kepala bidang diantaranya bidang ketenagaan, bidang penyelenggara penyuluhan dan bidang kelembagaan yang dimana masing-masing dibidang dibantu oleh 2 anggota sub bidang. Tugas dari lembaga ini adalah melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan program penyuluhan, memfasilitasi yang dibantu oleh pengembangan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas penyuluh

(Rosnita, 2015).

2. Kelembagaan di tingkat kabupaten

Menurut UUD No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengemukakan bahwa kelembagaan ditingkat kabupaten berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Kabupaten Kampar memiliki lembaga khusus yang bernama Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP). Lembaga ini masih bergabung antara lembaga penyuluhan dengan ketahanan pangan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar menetapkan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar

Gambar 1 menggambarkan struktur Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar yang terdiri dari kepala badan, sekretaris yang dibantu oleh 3 sub bidang, 4 kepala bidang meliputi bidang tata penyuluhan, bidang penyelenggaraan penyuluhan, bidang kewaspadaan pangan dan bidang keanekaragaman pangan, 8 orang sub bidang, jabatan fungsional (penyuluh) dan membawahi 21 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Tugas masing-masing jabatan pada struktur diatur pada Peraturan Bupati Kampar No. 56 tahun 2012.

Kepala badan yang memiliki jabatan tertinggi di BPPKP Kabupaten Kampar memiliki tanggungjawab yang besar kepada bupati Kampar dalam membantu bupati Kampar menjalankan tugas sebagai penyelenggara dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan, hanya saja penyelenggara penyuluhan yang dilakukan hanya dibidang pertanian. Hal ini disebabkan penyuluh perikanan dan kehutanan masih berada pada dinas masing-masing. Kepala badan juga memiliki fungsi dalam menyusun kebijakan dan program. Kebijakan dan program telah disusun oleh kepala badan untuk 5 tahun kedepan yang dimuat pada buku Rencana Strategi BPPKP Kabupaten Kampar tahun 2012-

2016. Kepala badan juga melakukan tugas pengawasan kegiatan penyuluh dan ketahanan pangan yang dibantu oleh kepala bidang.

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan data serta kegiatan keuangan di lingkungan Badan. Sejauh ini sekretaris sudah melaksanakan tugasnya dimana kegiatan administrasi sudah tersusun rapi dan pelaporannya sangat jelas. Sekretaris dibantu oleh 3 sub bagian yang terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan data dan sub bagian keuangan.

Kepala bidang tata penyuluhan memiliki tanggungjawab kepada kepala badan serta mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengendalian dan pengawasan penyuluhan, pengkajian, penerapan teknologi dan kemitraan usahatani, pengembangan sistem metodologi dan program penyuluhan. Sejauh ini kepala bidang sudah melaksanakan tugas, yang dimana kepala bidang sudah menyusun program penyuluhan untuk setiap tahun sesuai dengan kebutuhan petani. Kepala bidang juga sudah melakukan suatu pengkajian baik itu pengembangan teknologi maupun metode, pengkajian tersebut dimuat dalam program penyuluhan. Metode yang digunakan penyuluh melalui pengkajian yang dilakukan adalah menggunakan metode demonstrasi cara dan demonstrasi plot. Tetapi untuk pengawasan yang dilakukan kepala tata penyuluhan belum melaksanakan tugas dengan maksimal dikarenakan jumlah tenaga penyuluh masih terbatas dan tidak merata disetiap daerah. Kepala bidang dibantu oleh 2 sub bidang yaitu sub bidang pengkajian, penerapan teknologi dan kemitraan usaha serta sub bidang pengembangan sistem metodologi pengendalian penyuluhan. Kepala bidang penyelenggaraan penyuluhan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu kepala badan dalam pelayanan teknis, informasi dan komunikasi dan kelembagaan penyuluhan walaupun belum maksimal. Hal ini diakrenakan kepala bidang penyelenggaraan penyuluhan belum dapat memperbaiki kelembagaan penyuluhan, dimana seharusnya kelembagaan penyuluhan harus sesuai dengan UUD No. 16 tahun 2006 yaitu kelembagaan penyuluhan harus berbentuk badan pelaksana penyuluhan yang dimana kegiatan penyuluhan bersifat polivalen. Kepala bidang juga sudah melakukan kerjasama dengan radio siaran pemerintah daerah Kampar dalam penyampaian materi Teknologi Pertanian setiap minggu dan melakukan kerjasama dengan intansi atau dinas-dinas lainnya. Kepala bidang dibantu oleh 2 sub bidang diantaranya sub bidang pelayanan teknis, informasi dan komunikasi dan sub bidang kelembagaan penyuluhan.

Kepala bidang kewaspadaan memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keadaan pangan serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Kepala bidang kewaspadaan dibantu oleh 2 sub bidang diantaranya sub bidang ketersediaan pangan dan sub bidang distribusi harga pangan. Kepala bidang Keanekaragaman Pangan memiliki tugas membantu kepala badan dalam memantau an mengevaluasi dan membuat analisis terhadap mutu pangan dan gizi. Kepala bidang Keanekaragaman Pangan dibantu oleh 2 sub bidang yang

terdiri dari sub bidang konsumsi pangan dan gizi dan sub bidang mutu, keamanan dan keanekaragaman pangan. Bidang kewaspadaan dan Keanekaragaman pangan hanya menganalisa dan mengevaluasi keadaan pangan dan untuk menindaklanjuti masalah tersebut diserahkan kepada dinas pertanian ataupun instansi terkait.

Jabatan fungsional merupakan jabatan yang diberikan kepada penyuluh karena tugasnya dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan tidak bekerja pada struktural, tetapi tetap memiliki tanggungjawab kepada kepala badan. Jabatan Fungsional diberikan kepada semua penyuluh yang berada pada BPPKP kabupaten Kampar. Jabatan fungsional berjumlah 191 orang yang dimana 170 orang merupakan penyuluh lapangan yang tersebar di 21 BPP Kecamatan dan 21 orang merupakan penyuluh yang memiliki tugas dikantor BPPKP.

Kegiatan penyuluhan yang seharusnya dilakukan oleh BPPKP ada kegiatan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan UUD No. 16 tahun 2006 tetapi kenyataan yang ditemukan dilapangan penyuluh BPPKP hanya melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian dikarenakan penyuluh di BPPKP merupakan penyuluh pertanian yang hanya menguasai dibidang pertanian, sementara penyuluh yang menguasai dibidang perikanan dan kehutanan memiliki wadah tersendiri dimasing-masing dinas dan belum bergabung dengan BPPKP Kabupaten Kampar. Walaupun demikian pelaksanaan dilapangan semua penyuluh saling membantu untuk memecahkan masalah petani dan setiap dinas saling berkoordinas dengan BPPKP

Struktur organisasi BPPKP Kabupaten Kampar menggambarkan bahwa BPPKP Kabupaten Kampar membawahi 21 BPP kecamatan. Setiap BPP memiliki kantor masing-masing. BPP setiap kecamatan dapat dijabarkan pada Tabel 3

Tabel 3. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setiap kecamatan

No	Lembaga	Lokasi	Kepala
1.	BPP Siak Hulu	Kec Siak Hulu	Rosmita,SP
2.	BPP Kampar Kiri Tengah	Kec Kampar Kiri Tengah	Suardi
3.	BPP Kecamatan Kampar Utara	Kec. Kampar Utara	Harnaini
4.	BPP Perhentian Raja	Kec.Perhentian Raja	M.Taher
5.	BPP Gunung Sahilan	Kec.Gunung Sahilan	Binar , A.Md
6.	BPP Salo	Kec.Salo	Supomo,SP
7.	BPP Tambang	Kec.Tambang	Miswandi
8.	BPP Tapung	Kec.Tapung	H.Suharyo,SP
9.	BPP XIII Koto Kampar	Kec.Koto Kampar	Martius,SP
10.	BPP Kuok	Kec.Kuok	Agustina
11.	BPP Koto Kampar Hulu	Kec.Koto Kampar Hulu	Antonius
12.	BPP Rumbio Jaya	Kec.Rumbio Jaya	Sumarwanto,SP
13.	BPP Tapung Hulu	Kec.Tapung	Giyono,SP
14.	BPP Kampar	Kec.Kampar	Amarudin,SP
15.	BPP Kampar Timur	Kec.Kampar Timur	Khainurisak
16.	BPP Kampar Kiri	Kec.Kampar Kiri	Sudirman
17.	BPP Bangkinang Kota	Kec.Bangkinang Kota	Ir Adi Imran
18.	BPP Bangkinang seberang	Kec.Bangkinang Seberang	Hj Nuraina,SP
19.	BPP Kampar Kiri Hilir	Kec.Kampar Kiri Hilir	H.Jaslan ,SPKP
20.	BPP Kecamatan Tapung Hilir	Kec.Tapung Hilir	Fadil,SP
21.	BPP Kampar Kiri hulu	Kec.kampar Kiri Hulu	Supardi,SP

Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan , 2015

Balai Penyuluhan Pertanian berada disetiap kecamatan di Kabupaten Kampar. Setiap BPP dikepalai oleh seorang kepala yang disebut dengan Kepala BPP yang memiliki tugas dalam mengkoordinir kegiatan penyuluhan di kecamatan agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik. Kepala BPP merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Badan.

Kegiatan penyuluhan pertanian dapat berhasil apabila adanya penyuluh dan kelompok tani. Keberhasilan kegiatan penyuluhan dapat dilihat apabila pembagian kelompok tani dan desa binaan untuk setiap penyuluh dilakukan secara merata. Jumlah penyuluh dengan luas wilayah binaan, desa binaan dan kelompok tani binaan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi data jumlah penyuluh lapangan, luas wilayah binaan, jumlah desa dan jumlah kelompok tani BPPKP Kabupaten Kampar

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penyuluh (orang)	170
2.	Jumlah luas wilayah (Ha)	395.783
3.	Jumlah desa (desa)	204
4.	Jumlah Kelompok tani (kelompok)	1871
5.	Rasio desa / penyuluh	1:2
6.	Rasio kelompok tani / penyuluh	1:10
7.	Rasio wilayah/ penyuluh	1:1.548

Sumber : Data Olahan, 2015

Pada Tabel 4 menggambarkan bahwa jumlah luas wilayah binaan BPPKP Kabupaten Kampar seluas 395.783 Ha yang meliputi lahan tanaman padi sawah maupun padi ladang, tanaman

perkebunan, tanaman hortikultura serta luas lahan peternakan. Luas wilayah tersebut dibina oleh penyuluh sebanyak 170 orang Penyuluh yang bernaung pada BPPKP terdiri dari penyuluh PNS, Honor APBD dan THL-TBPP yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah penyuluh lapangan di Kabupaten Kampar berdasarkan golongan

No	Penyuluh	Jumlah	Persen
1.	PNS	148	87
2.	Honor APBD	2	1
3.	THL-TBPP	20	12
Total		170	100

Sumber: Data Penyuluh BPPKP, 2015

Penyuluh lapangan lebih didominasi oleh penyuluh PNS yaitu sebesar 87 persen dan dilanjutkan dengan penyuluh THL-TBPP sebesar 12 persen dan persentase terendah yaitu penyuluh honor APBD sebesar 1 persen. Penyuluh pada BPPKP tersebar pada 21 BPP kecamatan dan BPPKP Kampar. Penyebaran dilakukan tidak merata disebabkan setiap kecamatan memiliki jumlah desa dan kelompok tani yang berbeda. Jumlah desa binaan BPPKP sebanyak 201 desa dimana BPP yang memiliki desa binaan terbesar adalah BPP Kecamatan Tapung sebanyak 25 desa binaan dan BPP yang memiliki desa binaan terkecil adalah BPP kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 3 desa. Sementara jumlah kelompok tani wilayah binaan BPPKP sebanyak 1.871 kelompok, dimana kelompok tani yang terbanyak berada pada BPP Kecamatan Tapung sebanyak 422 kelompok dan jumlah kelompok tani yang paling sedikit yaitu pada BPP Kelurahan Bangkinang Kota sebanyak 32 kelompok tani. Kelompok tani binaan BPPKP diklasifikasi beberapa tingkatan yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Klasifikasi kelompok tani BPPKP Kabupaten Kampar

No	Penyuluh	Jumlah	Persen
1.	Pemula	1033	55
2.	Lanjut	548	29
3.	Madya	92	5
4.	Utama	0	0
5.	BLKK	198	11
Total		1871	100

Sumber : BPPKP Kab Kampar, 2015

Tabel 6 menggambarkan bahwa jumlah kelompok tani yang terbanyak adalah kelompok tani Pemula sebanyak 55 persen. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 82 tahun 2013 kelompok tani terbagi atas 4 kelas utama yang dimana pembagian kelas tersebut disesuaikan dengan hasil skor yang diraih ketika dilakukan pelatihan. Adapun skor yang harus diraih adalah 1) Kelas Pemula dengan skor 0-250, 2) Kelas Lanjut dengan skor 251-500, 3) Kelas Madya dengan skor 501-750 dan 4) Kelas Utama dengan skor diatas 751. Selain ke 4 kelas tersebut, Kabupaten Kampar memiliki kelompok tani yang belum dikukuhkan secara sah yaitu sebanyak 198 kelompok tani.

Kelompok tani di Kabupaten Kampar masih tergolong kelompok tani pemula dimana kelompok tani hanya memiliki skor 0-250 dan kelompok tani tersebut masih digolongkan kelompok tani yang belum aktif dan kegiatan kelompok masih bersifat informatif. Dengan demikian perlu dilakukan pelatihan yang lebih lagi kepada kelompok tani agar kelompok tani dapat menduduki kelas yang lebih tinggi lagi.

Rasio perbandingan desa binaan BPPKP dengan banyak penyuluh yaitu 1 : 2 yang dimana 1 orang penyuluh memegang 2 desa. Menurut UUD No 16 tahun 2006 menjelaskan bahwa masing-masing penyuluh harus memiliki 1 desa binaan, dengan demikian kegiatan penyuluh di BPPKP kampar belum bisa dikatakan maksimal. Sementara untuk rasio perbandingan kelompok tani dengan penyuluh yaitu 10 :1 yang dimana 1 penyuluh memegang 10 kelompok tani yang dimana mengatur jadwal untuk 10 kelompok tani sangat sulit sehingga penyuluh tidak bisa melakukan kegiatan penyuluhan secara merata untuk setiap kelompok tani sehingga kegiatan penyuluhan juga belum bisa dikatakan maksimal ditambah dengan sarana transportasi yang kurang mendukung serta luas wilayah binaan untuk setiap penyuluh sangat luas yaitu masing-masing penyuluh memiliki luas wilayah binaan sebesar 1.548 Ha. Melihat kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan di BPPKP Kabupaten Kampar belum maksimal serta perlu dilakukan pembenaan kapasitas tenaga penyuluh supaya kegiatan penyuluhan di Kabupaten Kampar dapat berjalan maksimal

3.3 Aturan Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Aturan Kebijakan Penyuluhan Pertanian yang digunakan oleh BPPKP Kabupaten Kampar adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang dimana didalam Undang-Undang ini berisikan bahwa penyuluhan harus bersifat polivalen dan setiap penyuluh harus memiliki masing-masing 1 desa binaan tetapi kenyataannya BPPKP belum melaksanakan peraturan perundangan tersebut dimana kegiatan penyuluhan di kabupaten Kampar belum bersifat polivalen serta penyuluh masih memegang lebih dari 1 desa binaan.

Aturan kebijakan yang selanjutnya yang diterapkan oleh BPPKP adalah Peraturan Daerah No. 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dimana BPPKP dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan tetapi saat ini aturan kebijakan ini belum dilaksanakan sepenuhnya disebabkan penyuluhan perikanan dan kehutanan belum bergabung pada BPPKP dan masih berada pada dinas masing-masing. Penyuluhan perikanan terpisah dengan penyuluhan pertanian disebabkan karena penyuluhan perikanan memiliki instansi tersendiri yaitu berada pada

departemen kelautan dan perikanan seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No 19 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Angka Kreditnya. Sementara untuk penyuluhan kehutanan juga telah memiliki aturan kebijakan tersendiri berbeda dengan aturan kebijakan dari penyuluh perikanan dan pertanian yaitu Peraturan Menteri No 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Kehutanan dan Angka Kreditnya yang dimana penyuluhan kehutanan berada pada departemen kehutanan yang dimana instansi pembina penyuluhan kehutanan adalah menteri kehutanan.

BPPKP Kabupaten Kampar juga membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan disusun oleh kepala Badan bersamaan dengan aparat lainnya. Adapun kebijakan yang disusun khususnya dibidang penyuluhan adalah BPPKP Kabupaten Kampar dan BPP setiap kecamatan harus membuat suatu pogram yang bersifat mengembangkan kelembagaan penyuluhan melalui program pembangunan pertanian yang disusun setiap tahun. Program penyuluhan yang telah disusun sudah mengutamakan kegiatan berorientasi pada nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna melalui kegiatan berupa mimbar sarasehan KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dengan membuat suatu pelatihan dan pendampingan kepada petani serta melakukan kegiatan berupa Diklat Pertanian Terpadu. BPPKP juga menetapkan kebijakan dimana setiap penyuluh harus melakukan pelatihan. Pelatihan dilakukan secara rutin setiap 2 kali dalam sebulan yang berguna dalam pengembangan dan meningkatkan kemampuan penyuluh. BPPKP juga menyusun kebijakan pengembangan penyuluhan polivalen ditingkat kecamatan dan desa tetapi kebijakan tersebut belum diterapkan dikarenakan kemampuan penyuluh di BPPKP masih kurang (belum menguasai semua bidang).

3.4 Program Lembaga Penyuluhan di Kabupaten Kampar

Programa Pertanian pada hakekatnya adalah alat pedoman serta alat pengendali untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan (UUD No. 16 tahun 2006). Penyusunan program Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan disusun sejalan program program yang disusun oleh dinas sub sektor lingkup Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan supaya pembangunan pertanian kearah yang lebih baik dapat terwujud dan sejalan dengan program yang disusun oleh masing-masing BPP. Adapun program BPPKP tahun 2015 diantaranya yaitu

1. Program pembangunan pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang pembangunan pertanian. Program ini diangkat karena banyak petani yang belum paham tentang pembangunan pertanian serta kurangnya informasi tentang pembangunan pertanian. Program pembangunan pertanian dilakukan dengan kegiatan mimbar serasehan KTNA yang dilakukan setiap tahun yaitu pada bulan Oktober.

2. Program Kepemimpinan, dinamika Kelompok. Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparat dan petani. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat suatu perlombaan BPP, PP, THL, kelompok tani. Perlombaan ini dilakukan 1 tahun sekali.
3. Program Budidaya Tanaman. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani yang dimana kita ketahui pada saat ini pemahaman petani masih rendah tentang teknologi sehingga program ini dilakukan dengan kegiatan Pekan Nasional (PENAS) dan dilakukan di Malang pada Bulan Juni.
4. Program Pertanian Terpadu. Program ini dibuat supaya petani ataupun kelompok tani mampu menciptakan hal yang baru dengan mengelola sumber daya yang ada dengan menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan serta perkebunan. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat suatu Diklat Pertanian Terpadu. Diklat Pertanian terpadu dilakukan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan (P4S) Kubang Jaya yang dilakukan setiap 2 minggu sekali secara rutin. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 2400 orang yang dimana peserta dari kegiatan tersebut merupakan kelompok petani yang terdapat di Kabupaten Kampar.
5. Program kewaspadaan pangan dan keanekaragaman pangan. Program ini dilakukan dengan kegiatan pelatihan yang bermanfaat untuk petani. Program ini disusun disebabkan karena konsumsi masyarakat belum bergizi.
6. BPPKP juga memiliki program rutin yaitu melaksanakan pertemuan 1 kali dalam sebulan dengan dihadiri oleh kepala BPP kecamatan serta dinas/ instansi lainnya. Pertemuan itu dilakukan di Bangkinang setiap tanggal 5 dan apabila tanggal 5 ketepatan hari libur maka pertemuan akan diganti hari selanjutnya. Program yang telah disusun dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai jadwal disebabkan karena keterlambatan pencairan dana dari pemerintah serta faktor alam. Program BPP setiap kecamatan disusun sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan petani. Program 21 BPP Kecamatan yang disusun pada tahun 2015 banyak mengarah kepada peningkatan teknologi bagi petani perkebunan, petani sawah dan peternak serta melakukan kegiatan LAKU yaitu kegiatan Latihan bagi penyuluh yang dilakukan setiap 2 kali dalam sebulan dan kegiatan Kunjungan kepada petani

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan memegang suatu visi “ Menjadi institusi yang handal, inovatif dan aspiratif dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pementapan ketahanan pangan serta misi yang selaras dengan visi dan misi dari Kabupaten Kampar serta

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau. Visi dan misi mengarah kepada pengembangan dan peningkatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kampar

2. Peran, fungsi dan tugas pokok dari masing-masing struktur belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan kebijakan yang diterapkan karena jumlah dan kemampuan personil BPPKP yang kurang, baik kemampuan dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta latarbelakang pendidikan yang tidak sesuai.
3. Aturan kebijakan penyuluhan yang disusun oleh BPPKP Kabupaten Kampar belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh BPPKP Kabupaten Kampar.
4. Program yang disusun oleh masing-masing BPP disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah serta sudah mengarah kepada visi dan misi BPPKP. Dalam pelaksanaan program tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan jadwal karena beberapa faktor diantaranya faktor alam dan biaya.

4.2 Saran

1. Pemerintah daerah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan UU No 16 tahun 2006.
2. Penambahan jumlah tenaga penyuluh perlu dilakukan agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan lebih optimal lagi.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan harus memegang kuat aturan kebijakan yang merupakan dasar dari pelaksanaan tugas.
4. Kebijakan pengadaan sarana dan prasarana, dana dan waktu lebih diperbaiki lagi agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, 2015. Data Penyuluh Pertanian Kabupaten Kampar. Kampar
- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, 2015. Program Penyuluhan tahun 2015. Kampar
- Peraturan Bupati Kampar No. 56 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan struktural di Lingkungan Badan Badan Kabupaten Kampar. Kampar
- Peraturan Menteri No 19 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri No 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Kehutanan dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri No. 82 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pembinaan Kelompok

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar. Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerta Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Kampar

Rakhmat, Jalaluddin. 2005. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Renstra BPPKP Kabupaten Kampar. 2012. Rencana Strategi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2012-2016. Kampar.

Rosnita. 2015. Potret Kelembagaan Penyuluhan di Riau Ditinjau Dari UU No 16 Tahun 2006. Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional FKP Universitas Lambung Mangkurat pada 29-30 September 2015. Banjarbaru

Sabrina, 2009. Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Riau. Tesis. Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006. 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta. Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah